

A. Latar Belakang Masalah

Secara kodrat manusia sebagai makhluk yang tidak dapat hidup tanpa orang lain, saling membutuhkan dan cenderung ingin hidup bersama. Berdasarkan sifatnya manusia sebagai makhluk dwi Tunggal, yaitu makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa ingin hidup dalam kebersamaan baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, Allah SWT menciptakan umat manusia secara berpasang-pasangan untuk melanjutkan keturunannya kemudian, Allah SWT memberikan cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Akan tetapi dengan berjalannya hidup seringkali manusia sulit menemukan pasangan yang telah ditakdirkan oleh Allah dan terkadang manusia salah dalam memilih pasangannya.

Ketika manusia telah menemukan pasangannya, maka Allah SWT menganjurkan kepada keduanya untuk mengesahkan hubungan keduanya melalui suatu upacara yang sakral yakni “pernikahan atau perkawinan”. Perkawinan merupakan perbuatan yang penting dalam kehidupan manusia, karena merupakan bentuk pergaulan hidup manusia dalam lingkungan hidup sosial yang terkecil, tetapi juga lebih dari itu bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan perbuatan keagamaan. Negara mempunyai kepentingan pula untuk turut mencampuri urusan masalah perkawinan dengan membentuk dan melaksanakan perundang-undangan tentang perkawinan. Sebab itu dalam hal menjalankan perkawinan kita harus tunduk pada aturan perkawinan yang ditetapkan oleh Negara. Tujuannya untuk memberi perlindungan hidup terhadap rakyat sebagai salah satu unsur negara, melalui hukum yang berlaku dan diberlakukan terha

Untuk pengaturan masalah perkawinan tersebut telah terbentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara dan masyarakat di

Indonesia. Sebagaimana yang diketahui bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1).

Dalam hukum perdata perkawinan merupakan pertalian yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Dari rumusan perkawinan diatas tersebut tidak hanya ikatan lahir atau ikatan batin saja tetapi kedua-duanya.

Ikatan lahir mengungkapkan hubungan formal, sedangkan ikatan batin merupakan ikatan yang tidak formal, tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan. Ikatan lahir tanpa ada ikatan batin akan menjadi rapuh. Hidup berkeluarga adalah fitrah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Karena itu, yang berakal dan sehat tentu mendambakan keluarga bahagia, sejahtera damai dan kekal. Rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga di mana seluruh anggota keluarga tidak selalu mengalami keresahan yang menggoncangkan sendi-sendi keluarga. Rumah tangga sejahtera adalah rumah tangga yang dapat dipenuhi kebutuhan hidupnya, baik lahir maupun batin menurut tingkat sosialnya. Rumah tangga yang damai adalah rumah tangga di mana para anggota keluarganya senantiasa aman tentram dalam suasana kedamaian dan bebas dari percekocokan dan pertengkaran. Sedangkan rumah tangga yang kekal adalah rumah tangga yang terjalin utuh dan tidak terjadi perceraian seumur hidupnya.

Kehidupan rumah tangga penuh dengan suka dan duka, penuh liku-liku yang baik dan buruk. Suami istri terkadang menjauh setelah sebelumnya bersatu padu, terkadang bertengkar setelah sebelumnya berkasih sayang. Karena itulah ketenangan keluarga berbalik kepada cuaca yang panas dan buruk.

Perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Dengan demikian perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang laki-laki tidak dimungkinkan begitu pula dengan perkawinan antara seorang wanita dengan seorang wanita. Salah satu prinsip perkawinan yaitu menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya karena perkawinan tidak hanya perbuatan perdata semata tetapi ikatan suci yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah SWT.

Tetapi, tidak semua tujuan perkawinan itu dapat dilaksanakan sesuai cita-cita, walaupun telah diusahakan sedemikian rupa oleh pasangan suami isteri. Sejatinya rumah tangga di bina oleh suami-isteri, dan di jaga keharmonisannya. Dan kesalahpahaman yang terjadi haruslah di hindari. Kenyataannya, jarang terjadi suami isteri yang hidup bersama menjalani kehidupan tanpa adanya perselisihan. Dalam rumah tangga perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri adalah merupakan hal yang biasa, tetapi hal inilah yang menjadi awal mulanya terjadi perceraian.

Setiap manusia pasti mempunyai masalah dalam hidupnya, dan tergantung dari kita bagaimana memecahkan masalah tersebut. Pertengkaran dalam rumah tangga ini sampai menimbulkan permusuhan maka perceraian pun terjadi. Setiap perceraian pasti diawali dengan adanya konflik yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga sehingga tidak tercapai esensi dari pernikahan itu sendiri yaitu untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Perceraian merupakan akibat perkawinan dari kurang harmonisnya pasangan suami isteri. Di Indonesia sendiri banyak pernikahan yang gagal.

Secara psikis perceraian tentu akan berpengaruh pada anak, baik ketika anak tersebut masih anak-anak atau telah dewasa. Di kota Makassar sendiri, perceraian semakin meningkat disetiap tahunnya.

Ini terbukti dengan adanya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Makassar pada tahun 2012 sebanyak 2.264 perkara. Di tahun 2013 sebanyak 2.595 perkara dan di tahun 2014 sebanyak 2916 perkara. Sedangkan di tahun 2015 adalah sebanyak 4.700.

Fenomena perceraian yang terjadi di kota Makassar merupakan masalah yang serius dan membutuhkan langkah preventif dari pemerintah terkait, upaya yang telah dilakukan oleh pihak pengadilan untuk mempertimbangkan perceraian dengan cara mediasi telah dilakukan mengingat angka perceraian semakin meningkat.

Sehubungan dengan permasalahan penulis kemukakan, penulis tertarik melakukan penelitian menyangkut masalah perceraian di kota Makassar di sebabkan oleh jumlah kasus perceraian di kota Makassar mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa yang melatar belakangi sehingga terjadi kasus perceraian dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perceraian tersebut.

Sehingga melihat dari latar belakang masalah di atas maka penulis mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang *Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Makassar)*.

Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan, bahwa latar belakang terjadinya perceraian dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian tersebut adalah:

1. Latar belakang terjadinya perceraian dikarenakan beberapa faktor, yakni:
 - a. Poligami tidak sehat merupakan poligami yang dilakukan karena tidak memenuhi alasan dan syarat poligami sesuai dengan pasal 4 dan 5 UUP.

- b. Krisis akhlak sama dengan perselingkuhan yaitu berselingkuh secara diam-diam atau tidak diketahui oleh pasangan.
 - c. Cemburu merupakan dugaan yang belum tentu benar adanya, yang mengakibatkan perselisihan terus menerus dikarenakan oleh berlebihan rasa cinta dan kasih sayang tersebut.
 - d. Kawin paksa merupakan perkawinan yang dipaksakan oleh orang tua yang mengakibatkan perselisihan dan tidak bertanggung jawab karena tidak ada rasa cinta di antara keduanya.
 - e. Ekonomi terjadi karena kurang tercukupinya kebutuhan ekonomi kehidupan rumah tangga, karena kemauan yang banyak sedangkan penghasilan hanya seberapa menyebabkan perselisihan yang berakhir dengan perceraian.
 - f. Kekejaman fisik dan mental merupakan kekejaman yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya istri terhadap suami baik berupa jasmani maupun mental.
 - g. Gangguan pihak ketiga merupakan adanya campur tangan yang dilakukan oleh pihak ketiga dapat berasal dari keluarga yang menyebabkan salah paham sehingga terjadi perselisihan yang besar sehingga berakhir dengan perceraian.
 - h. Tidak ada keharmonisan dikarenakan adanya perselisihan yang terus menerus, untuk menentukan ada atau tidaknya perselisihan yang terus menerus dapat dibuktikan didepan Pengadilan.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian tersebut terlihat pada amar putusannya. Seperti duduk perkara di atas yakni Mengabulkan gugatan. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat terhadap Penggugat. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama

Makassar untuk mengirimkan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Kecamatan Makassar, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.